



Alamat Kantor :
Kempak, Pahlawan, Cakrawala
Pasar Teratai, Pondok Kelapa, Kecamatan Bontolungga
& Pulau Bontolungga - Kabupaten Pangkep - Sulawesi Selatan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN SUNDABESER



RENSTRA 2023-2026



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Website: www.dinkalprov.sunda.es.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat selesai tepat waktu. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pembangunan urusan pihutan Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kota. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dengan masa renstra 2023-2026. Sebagai Dokumen transisi, penyusunan Renstra mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 pengganti RPJMD dengan tetap disinkronkan dengan RPJMN selanjutnya.



Dalam implementasinya Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026 dapat berfungsi sebagai:

- 1) Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan pertanian bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- 3) Pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan rencana program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.

**KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dr. Der. AGUS SURYADI, M.Si
NIP. 19730809 199303 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Misi dan Tujuan	4
1.4 Sistematisa Pembuat	4
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan	6
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.1.1 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	7
2.1.2 Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	9
2.1.3 Kepala Bidang Pengolahan Kelautan, Perairan Dan Pulau-Pulau Kecil	11
2.1.4 Kepala Bidang Perikanan Tangkap	12
2.1.5 Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Peningkatan Hasil Perikanan	14
2.1.6 Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15
BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Telaah kesesuaian Tugas dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana PD	21
3.3 Telaah Rencana K/L dan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	23
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Perencanaan Isu Isu Strategis	28



BAB IV Tujuan Dan Sasaran	32
4.1 Tujuan dan Sasaran yang Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan	32
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	35
5.1 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan	35
5.2 Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	37
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	41
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	47
BAB VII Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpi/md	94
7.1 Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpi/md	94
BAB VIII Penutup	99
8.1 Penutup	99
LAMPIRAN	
Berita Acara Verifikasi Rencana Perangkat Daerah	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021-2026	31
Tabel 4.2	Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Rencana Dinas	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Penilaian Dinas Kesehatan Dan Perikanan Prov. Kep. Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana perangkat daerah merupakan rencana strategis yang disusun dalam kurun waktu 5 tahunan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Rencana perangkat daerah disusun dengan mengangkat isu strategis bidang urusan yang akan diselesaikan berdasarkan analisa faktor kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunity (O) dan tantangan/threat (T), atau yang lebih akrab dikenal dengan analisa SWOT. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka rencana yang akan disusun adalah rencana strategis bidang kelautan dan perikanan dengan jangka waktu 5 tahunan untuk menjawab permasalahan/isu strategis yang dihadapi yang merupakan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal bidang kelautan dan perikanan.

Rencana berfungsi sebagai buku panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah direvisikan di dalamnya. Rencana dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atau seruan untuk kegiatan yang dirumuskan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah seruan kegiatan yang dirumuskan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah melenceng jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen rencana perangkat daerah.



Kenstra disusun dengan mempertimbangkan ide dan masalah yang dimasukkan dalam berbagai pertemuan baik yang bersifat internal perangkat daerah atau dengan mengikutsertakan instansi lainnya maupun dengan mengundang langsung permasalahan yang ada dari hasil kunjungan lapangan ke masyarakat. Seluruh permasalahan/isi yang ada mulai dikonstruksi dan diklasifikasi berdasarkan tingkat *urgensinya* (U), *relevansinya* (R) dan *gravitasnya* (G) atau lebih dikenal dengan istilah metode URG. Berbagai permasalahan/isi tadi ditakar dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, disamping itu juga harus dilihat seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau ditunda dan yang terakhir seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi jika tidak segera ditangani.

Namun pada periode saat ini daerah tidak adanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Deklarasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Terakhir Pada Tahun 2021, maka pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan masa 2023–2026. Sehingga Renstra sebagai pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah hanya berlaku 4 tahun.

Dalam penyusunan renstra pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga harus disusun dengan menajuk Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RIKW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KZWP/IK). Penyesuaian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula



lainnya dari sisi perdatuan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Tiap alternatif strategi tadi disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya untuk dapat menilai tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Selain pendekatan secara perencanaan aksi, di dalam dokumen rencana perangkat daerah juga harus disusun rencana kebutuhan perhitungannya sebagai alasan awal dalam pemetaan juga indikator perangkat daerah pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan pertanggungjawaban. Secara berkala/jumlah, seluruh program dan kegiatan yang sudah disusun di dalam dokumen rencana ini akan dieksekusi melalui Rencana Perangkat Daerah tiap tahunnya. Rencana Perangkat daerah diharapkan tidak akan jauh melenceng dari arahan dan garis bawahan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Perangkat Daerah yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diura lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kodukoduk, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bareg Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D). Serta diperbaharui terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.6 Tahun 2021 tentang Kodukoduk, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata



Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D)

Kertra Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan Permenologi 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan mengacu kepada Permenologi 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Numeriklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Kepresendagri tahun yakni Kepmendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Numeriklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kertra Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjawab tantangan berdasarkan isu strategis yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk periode 5 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Kertra ini dibagi menjadi 8 Bab, dimana tiap bab memiliki karakteristik tersendiri.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang diperlukannya kertra ini, landasan hukum yang mendasarinya serta maksud dan tujuan dasarnya dikam kertra ini.



Bab II digambarkan pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada Bab I, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode pelaksanaan rencana sebelumnya.

Bab III berisi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, menelaah keselarasan antar Rencana Perangkat Daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah RPD, menelaah Rencana K/L, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta pemetaan isu-isu strategis.

Bab IV memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari perangkat daerah. Tujuan dan sasaran yang dimaksud disini adalah pada level dampak dan diukur olehnya Rencana ini kedepan nantinya. Berisi tujuan, sasaran serta indikatornya sebagai alat ukur keberhasilan.

Bab V berisi Strategi dan arah kebijakan. Masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detail bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPMD.

Bab VIII penutup.



BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lambiran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D) dan diubah oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Utusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Instansi ini dijalankan oleh 95 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 95 orang Tenaga Kontrak. Sebagai instansi yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dibantu oleh Kelembagaan yang sama di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Das untuk kewenangan yang berada di tingkat pusat, DKP Provinsi dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

2.1.1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, membina, mengendalikn dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas menyelenggara fungsi:

- penyelenggaraan perencanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- penyelenggaraan dan pengkoordinasian LPTD;
- penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- menyelenggarakan perencanaan dan penutupan program kerja;
- menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;



- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan meliputi bidang pengelolaan ruang laut, bidang perikanan tangkap, bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, bidang pengawasaan sumber daya kelautan dan perikanan dan keselamatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- d. menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. menyelenggarakan bidang pengelolaan ruang laut, bidang perikanan tangkap, bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, bidang pengawasaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- g. menyelenggarakan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian;
- j. menyelenggarakan pemantauan bahan RENSTRA, RSNIA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LAKIN, LAKIP, LKPI dan LPPD tingkat Dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoptimalkan penyajian bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. menyelenggarakan penyusunan saran dan pertimbangan di bidang kelautan dan perikanan;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- o. menyelenggarakan pertemuan, evaluasi dan pelaporan;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2.1.2. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

Sekretariat mempunyai tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempersiapkan, menerima, menbina, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi perencanaan, urusan dan kepegawaian, keuangan serta meribahi kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi meliputi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rancangan bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, urusan dan kepegawaian serta keuangan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan laporan keuangan dinas;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengisian formulir, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi urusan meliputi ketatausahaan, ketertinggalan, pengelolaan barang/surat, kebaruan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan persurutan dan kearsipan dinas;
- k. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan peraturan keberagaman dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian persiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang - undangan lingkup Dinas;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENCANA, RENJA, RKT, RKA, DPA, INPA, TAPKIN, LAKIP, LKIP DAN LPPD lingkup Dinas;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian persiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;



1. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan bahan tidak lanjut laporan pemeriksaan lingkup Dinas;
2. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap pemenuhan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan social di bidang kelautan dan perikanan;
3. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengolahan bahan pertimbangan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPFD dan/atau Cabang Dinas;
4. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
5. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
7. menyalurkan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Urutan tugas Sekretariat meliputi:

- a. menerima dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. menerima dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, urusan dan kepegawaian serta keuangan;
- d. menerima dan mengoordinasikan perencanaan;
- e. menerima dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. menerima dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengisian formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. menerima dan mengoordinasikan pelayanan administrasi urusan meliputi ketatausahaan, kemitraan/lingkungan, pengelolaan barang/surat, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. memverifikasi hasil pengkajian bahan peraturan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPFD dan/atau Cabang Dinas.



- l. menyetip dan mengoordinasikan penyajian bahan dan penyusunan rencana pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- j. menyetip dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKJ, RKA, DPA, DPA, TAPKIN, LAKIP, LKPD dan LPPD lingkup dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyajian bahan fasilitasi dan koordinasi informasi birokrasi dan SAKIP;
- l. menyetip dan mengoordinasikan pengolahan bahan tidak layak laperan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- m. memverifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pertanggung jawaban terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan bibit/bantuan sosial di bidang Kelautan Perikanan;
- n. menyetip dan mengoordinasikan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- o. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. menyetip dan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Di bawahnya terdapat 3 Subbag yaitu :

1. Subbag Perencanaan
2. Subbag Umum
3. Subbag Keuangan

1.1.3. Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, menyetip, mengawasi, membina, mengawasi dan mengoordinasikan pengkajian, penyajian, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi meliputi:



- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penyelenggaraan pengelolaan ruang laut, pemanfaatan dan pengembangan ruang laut sesuai kewenangannya dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Urutan tugas Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:

- a. menerima dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menerima dan mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menerima dan mengkoordinasikan pengelolaan ruang laut, pemanfaatan dan pengembangan ruang laut sesuai kewenangannya dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Di bawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
3. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

1.1.4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, menerima, mengawasi, membina, mengawasi dan mengendalikan



perglajian, penyajian, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyelenggaraan persiapan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan penangkapan ikan, pengolahan pelabuhan perikanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Urutan tugas Bidang Perikanan Tangkap meliputi:

- a. menampung dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
- b. menampung dan mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c. menampung dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan, pengolahan pelabuhan perikanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan prestasi Pegawai ASN; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Di bawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan; dan
3. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;



1.1.5. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memnmpn, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengerdalika pengkajian, penyusunan, pemertaan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
2. penyelenggaraan penyusunan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
3. penyelenggaraan pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
4. penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
7. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Utuan tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi:

- a. memnmpn dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. memnmpn dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- c. menyelenggarakan pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan;



- e. menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. menyelenggarakan pemerintahan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Pengembangan Usaha Perikanan Hasildaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu:

- 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Hasildaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- 2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
- 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

2.1.6. Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengorderir, mempromosikan, menampung, mengawas, menibasa, mengevaluasi dan melaksanakan pengkajian, persiapan, pemantauan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaraan persiapan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan perikanan tidak pidana kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan perikanan tidak pidana kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi dan pelaporan;



- f. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. menerima dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. menerima dan mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. menerima dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan penangkapan tidak pda kelautan dan perikanan;
- d. menerima dan mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan pengawasan tidak pda kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Di bawahnya terdapat 3 Seksi yaitu:

- 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil Laut;
- 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan Lintas Kabupaten/Kota; dan
- 3. Seksi Pengawasan Penangkapan Tidak Pda Kelautan dan Perikanan;

Di bawah ini disajikan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 29 Desember 2021.



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Rujukan Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, lingkungan anggaran, sarana, prasarana dan kelembagaan serta tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan lingkungan strategis di Kepulauan Bangka Belitung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan perikanan sebagai serta kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Permasalahan utama di pelabuhan perikanan Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan belum optimal dan harus segera di Bangun/Rehabilitasi serta belum adanya kelembagaan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Selain itu alir permasalahan yang banyak dijumpai di Pelabuhan perikanan adalah masih banyak nelayan tidak melakukan bongkar muat di pelabuhan perikanan tetapi di tangkahan masing-masing.



2. Produk Perikanan yang keluar dari Bangka Belitung masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Permasalahan ini disebabkan masih rendahnya investasi dalam hilirisasi produk perikanan.

3. Masih Terjadanya konflik kepentingan antar sektor antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir.

Permasalahan ini disebabkan antara lain masih berlakunya IUP di wilayah ruang laut untuk budidaya, konservasi maupun penangkapan sehingga secara hukum masih dibelakangi sesuai amanah perda. Selain itu akar permasalahannya adalah Masyarakat masih menganggap timah sebagai primadona, dan eksplorasi dilakukan secara ilegal dikawasan Rawa, Sungai, Laut tanpa memperhatikan tata guna lahan.

4. Masih maraknya kegiatan *illegal, unregulated and unreported fishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan ini timbul karena Masih belum optimalnya upaya pengawasan SUKP akibat Anggaran, Sumber dan SDM yang belum tersedia cukup di lapangan. Akar permasalahan ini semua akibat masih banyak pelaku usaha yang berani menggunakan API terlarang walun telah dilakukan sosialisasi.

5. Maraknya budidaya vaname belum didukung oleh peraturan daerah sebagai acuan dalam pengusahaan budidaya vaname sehingga belum memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Permasalahan yang ada di lapangan belum semua peternak memiliki izin usaha vananame yang lengkap. Ini semua disebabkan Aturan perizinan yang banyak dan melibatkan berbagai instansi membuat pelaku usaha kesulitan dalam proses pengurusan izin.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugan dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya perbaikan-perbaikan sebagai sarana kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah	Sarana dan prasarana perikanan belum optimal dan belum segera di Bangun/Rehabilitasi dan keberagaman unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) Perikanan Perikanan belum ada	Di kawasan tertentu nelayan tidak melakukan bergula sama di perbaikan perikanan tetapi di tangkapan semakin-sangat
2.	Produk Perikanan masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha	Masih minimnya inovasi dalam hilirisasi produk perikanan	
3.	Masih Terjadinya konflik kepentingan antar sektor antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir	Masih berlakunya RUP di wilayah yang laut untuk budidaya, konservasi maupun penangkapan sehingga secara hukum masih dibedakan secara antar-sektor	Masyarakat masih menganggap Gula sebagai primadona, dan eksploitasi dilakukan secara ilegal dikawasan Rawa, Sungai, Laut tanpa memperhatikan tata guna lahan.
4.	Masih rendahnya kegiatan <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah pesisir provinsi kepulauan Bangka Belitung	Masih belum optimalnya upaya penegakan SDCP akibat Anggaran, Supras dan SDM yang belum tersedia cukup di lapangan	Banyak pelaku usaha yang baru menggunakan API sehingga nilai jual dilakukan sosialiasi
5.	Maraknya budidaya vanana belum dibudidayakan oleh pemerintah daerah sebagai aman dalam pengembangan budidaya	Belum semua pemerintah memiliki inisiatif usaha vanana yang lengkap	Aturan pemerintah yang banyak dan melibatkan berbagai instansi membuat pelaku usaha



No	Masalah Fokus	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	variansi sebagai belum memberikan kontribusi langsung pada pertumbuhan daerah		kegiatan dalam proses pengurusan izin.

3.2. Telaah keselarasan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana PD

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Rancangan awal RPD yang disusun oleh tim penyusun RPD yang dikordinir oleh Happeda.

Tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah.
2. Terperahnya kapasitas dan kualitas SDM.
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Menarainya derajat pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran sejumlah 26 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PIDRH Sub Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya PIDRH Sub Sektor Perikanan;
3. Meningkatnya PIDRH Sub Sektor Pertambangan Dan Peggalian;
4. Meningkatnya PIDRH Sektor Industri Pengolahan;
5. Meningkatnya PIDRH Sub Sektor Perdagangan;
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik;
7. Meningkatnya Ekspor;
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah;
9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia;



10. Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur;
13. Meningkatkan Kualitas dan Perwujudan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Terpadu Tata Ruang;
14. Memastikan Risiko Bencana;
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
16. Laju Pertumbuhan Perdesaan;
17. Memastikan Tingkat Kemiskinan;
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja;
19. Meningkatkan Penghasilan Lingkungan Hidup.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026 adalah Meningkatkan ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan Pertumbuhan PDRH, yang diintervensi dengan sasaran Meningkatkan PDRH Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRH Sub Sektor Perikanan. Dimana Dinas Kelautan dan perikanan mendukung penuh sasaran RPD dengan menerjemahkan melalui tujuan renstra melalui Meningkatkan PDRH Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRH Sub Sektor Perikanan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi perikanan tangkap;
- b. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi perikanan budidaya;
- c. Meningkatkan Produksi pengolahan hasil perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan;



4. Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi dengan indikator kinerja sasaran Perumtanas Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi. Sedangkan untuk tujuan meningkatnya Indeks Reformasi Daerah dengan indicator di inspeksi dengan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di terjemahkan dalam tujuan rencana Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP) dengan sasaran rencana berupa Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP) Nilai RH Perangkat Daerah (DKP) Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP) dengan indicator kinerja sasaran Produktif RH Perangkat Daerah (DKP) dengan indikator kinerja sasaran Nilai RH Perangkat Daerah (DKP). Tujuan dan sasaran rencana Dinas Kelautan dan Perikanan telah merencanakan apa yang menjadi tujuan sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.

3.3. Telaahan Rencana K/L dan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Kota

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, dokumen tersebut merupakan acuan dan arahan bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Telaahan Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020-2024) dilaksanakan untuk menilai kesesuaian, keterpakaian, viabilitas, dan integritas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sasaran Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan arahan yang menjadi



keberhasilan serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai mata hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sertifikasi daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan Peta Strategi sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja:

- 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan



- 3) Konservasi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan", dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam lintasan biologis yang aman dari $\geq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\geq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Kapabilitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja: 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan 2) kelompok pelaku usaha/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan", dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab", dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 korulanah Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah "Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing", dengan indikator kinerja:



- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) dana yang dialokasikan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;
- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah **"Penguasaan sumber daya kelautan dan perikanan integratif"**, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
- 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (Input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) **"Tatalaksana pemerintahan yang baik"** dengan indikator kinerja: 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024, dan 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Selain Kemampu Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan jajarannya merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode 2023-2026,



faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rencana Dinas yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang selain penjabaran Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kondisi lingkungan sekaligus sebagai masukan bagi Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam mendorong pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisis Rencana K/L dan PD kabupaten/kota ditajukan untuk menilai keserasian, ketepatan, sinkronisasi, dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Rencana K/L dan Rencana PD kabupaten/kota sesuai dengan arahan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan melihat bahwa memang sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat telah mengungkap indikator yang sama. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sasarnya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil capaian inilah nanti akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode rencana 5 tahunan berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Kabupaten/Kota maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor penghambat serta pendukung penyelesaian permasalahan adalah kurang lebih sama seperti yang disajikan pada sub bab 3.2. di atas. Upaya yang harus ditempuh adalah memprioritaskan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah terhadap RTRW dan KLHS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bidang pembangunan kelautan dan perikanan maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor pendorong serta pendorong penyelesaian permasalahan tersebut. Secara spesifik, telaah terhadap RTRW dan KLHS ini adalah mangaca pada penyelesaian permasalahan dengan sasaran ke-5 dari RPJMD yang telah dibahas pada sub bab 3.2 di atas.

Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) mengisyaratkan bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengarah pembangunan dengan pendekatan kawasan. Berdasarkan telaah terhadap dokumen tersebut didapatkan informasi bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan terdapat 5 lokasi pembangunan dengan pendekatan kawasan pembangunan, yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis Mirapoltan Lepar Pongok.
2. Pengembangan kawasan strategis Etalase Perikanan Sehat Nasik.
3. Pengembangan kawasan strategis Indeks Perikanan Tanjung Binga.
4. Pengembangan kawasan Pedesaan Mirapoltan Manggar.

Keempat kawasan pembangunan ini, nantinya akan dikorjakan tidak hanya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, namun melibatkan antar sektor seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Permukiman, Air Bersih, Kopertis, Tenaga Kerja dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan sudah masuk di dalam dokumen perencanaan RKPD 2023-2026.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat mendasar dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas program



perencanaan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika bisnisnya dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dihindarkan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Rencana, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkap daerah terhadap KPJMD, Rencana KKP dan Dinas Perikanan Kabupaten Kota, KIRW dan KLHS pada Sub Bab 3.2 sampai dengan 3.4, maka didapat 6 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keenam isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 4 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.3.

Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Kajian

No.	Permasalahan	Nilai Skala Likert (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriusitas (S)	Gejala (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	4	5	5	14
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang budidaya tangkap	5	4	5	14
3	Masih rendahnya akses permasalahan untuk pengangkutan usaha	4	5	5	14
4	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor coastal sector kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir	3	4	4	11
5	Belum optimalnya pembangunan Kawasan pengangkutan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditunjuk di dalam Deklarasi RTKW	4	4	4	12
6	Masih masih terjadinya illegal unregulated and unreported fishing di wilayah pesisir provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	3	4	11

Sumber: Tak Bermanfaat. *Tinjauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.



Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2 dan 3 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Jika kita nilik lebih jauh teryou ketiga permasalahan ini dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis, yaitu Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan dan perikanan. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 4 dan nomor 6. Kembali, secara garis besar permasalahan ini dapat lebih disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis berikutnya, yaitu **Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kelurahan dan perikanan dalam mentaati peraturan**. Terakhir, permasalahan yang memiliki jumlah bobot terendah, yaitu **12 poin** adalah permasalahan nomor 5. Secara lebih sederhana dapat diangkat menjadi isu strategis yang terakhir, yaitu **Masih belum optimalnya pembangunan kelurahan dan perikanan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isu Strategis Renstra Dinas Kelurahan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026 adalah:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan dan perikanan.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kelurahan dan perikanan dalam mentaati peraturan.
3. Masih belum optimalnya pembangunan kelurahan dan perikanan.



BAB IV

Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diars Keluasan dan Perikasan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 selagannya berikut ini.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 (Rencana Kelembagaan dan Partisipasi Finansial) Periode 2011-2014

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tujuan Kinerja Tahunan Tahun Tahun				Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Kinerja Sasaran Tahun Tahun			
			Rencana						Rencana			
			2011	2012	2013	2014			2011	2012	2013	2014
1	Meningkatkan kualitas layanan akademik dan non akademik	Laju Pertumbuhan IPK dan Indeks Akademik Mahasiswa	1,0	1,0	1,1	1,1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Laju Pertumbuhan jumlah mahasiswa	1,2%	1,4%	1,2%	1,4%
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Laju Pertumbuhan jumlah mahasiswa	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%				
			Meningkatkan Kualitas pengabdian masyarakat	Laju Pertumbuhan jumlah pengabdian masyarakat	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%				
			Meningkatkan Laju Ekspansi yang dapat diukur (baru)	Persentase baru dan Ekspansi yang diukur	1%	2%	2%	2%				
2	Meningkatkan layanan akademik dan non akademik (baru)	Revisi dan Strategi Baru (R&B)	11,7	11,8	12	12,1	Meningkatkan Fasilitas, Sarana dan Prasarana (baru)	Nilai Baru Sarana dan Prasarana (R&B)	11	11	12	12





4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Tingkat Menengah Dinas Kabupaten dan Perkotaan dengan Tujuan dan Sasaran RPJ

Menyusun strategi atau tujuan dan sasaran dari Dinas Kabupaten dan Perkotaan di masa serta tujuan dan sasaran dari RPJ. Perencanaan Kebijakan Tingkat Nasional merupakan acuan atau patok yang harus selalu diacu. Tujuan lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Rencana Dinas

No	KABUPATEN				PERKOTAAN			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kemampuan ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatkan PDRB dan Indeks Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB dan Indeks Perikanan	Meningkatkan PDRB dan Indeks Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB dan Indeks Perikanan	Meningkatkan Produktivitas Perikanan Tangkap	Laju Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap
							Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budidaya	Laju Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya
							Meningkatkan Produktivitas pengolahan hasil perikanan	Laju Pertumbuhan produktivitas pengolahan hasil perikanan
							Meningkatkan nilai dan kualitas yang dapat diandalkan	Pertumbuhan nilai dan kualitas yang dapat diandalkan
4	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Peningkatan kemampuan manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	



BAB V

Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran dan tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RENCANA. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan umum tujuan, kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah dibekali oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

5.1 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga sebagai RENCANA



STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dasar untuk memetakan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2023-2026. Strategi yang dipilih untuk ditropikan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Seng Prodak Perikanan;
3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengolahan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mii;
4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk penguatan reformasi birokrasi internal perangkat daerah.

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Hubungan Tujuan Sasaran dan Strategi
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan PORB Sub Sektor Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya 3. Meningkatkan Produksi	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan 2. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka



Tujuan	Sasaran	Strategi
	pergerakan hasil perikanan	meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan
	4. Meningkatkan jumlah Jasa Keluaran yang dapat dihasilkan (lokasi)	3. Meningkatkan produktivitas, pengolahan dan pemasaran pengolahan dan pemasaran ternak mangrove serta kepastian usaha kelautan dan perikanan ≥ 12 Mili
2. Menyelesaikan reformasi birokrasi perangkat daerah	3. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP)	4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk percepatan reformasi birokrasi internal perangkat daerah

Sumber: *Hasil Rancangan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

5.2 Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya. Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikaitkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, dan tujuan dirincikan dalam berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan	1. Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil



Tujuan	Isu/Aspek	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>2. Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budidaya.</p> <p>3. Meningkatkan Produktivitas perikanan hasil perikanan.</p>	<p>hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM Petaka usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktivitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan.</p>	<p>perikanan dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan daerah.</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan kapasitas SDM Petaka usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktivitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan.</p>
	<p>4. Meningkatkan jumlah dan Kualitas yang dapat dimanfaatkan (lokal).</p>	<p>3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelahan dan pemanfaatan sumber laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mtd.</p>	<p>3. Pengembangan SDM, Sumber dan prosesnya dalam rangka kretribusi, Mengembangkan dan integrasi pengelahan dan pemanfaatan sumber laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mtd.</p>
<p>2. Meningkatkan referensi, inovasi perangkat daerah .</p>	<p>3. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP).</p>	<p>4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk penguatan referensi, inovasi internal perangkat daerah.</p>	<p>4. Pengembangan, Penguatan Pelaksanaan dan, Evaluasi, Prosedur Standar Operasional Pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada petaka usaha kelautan dan</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perilaku serta masyarakat umumnya.

Sumber: *Dokumen Kebijakan Pemantauan Risiko Sistem dan Perlakuan Tercita Kebijakan Berbasis Bukti*

Pelaksanaan keempat arah kebijakan DKP tersebut perlu didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan DKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP DKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama. Arah kebijakan dan strategi tersebut diuraikan juga dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari Retribusi Perikanan Kekayaan Daerah, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Perjudian Produksi Usaha Daerah. Peningkatan penerimaan PAD pada periode tahun 2017-2022 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2023-2026. Peningkatan tersebut memantapkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023-2026, meliputi:

1. Tigan pembangunan berkelanjutan;
2. Gender;
3. Lemak



4. Inovasi

Pengantaraman dalam Rencana 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Konsep mainstraming ini akan memandu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempromosikan pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengantaraman ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB-SIGs mencakup 17 tujuan/ goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SIGs, diperhatikan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat koorsmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water) yang mencakup diantaranya:

- mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih.

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengantaraman Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengantaraman Gender (PLG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan



perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. DKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang mencakup:

- a. penguatan tajuk prasyarat Penguatan Gender (PUG), yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpadu, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penguatan roadmap PUG sektor Kelautan dan Perikanan;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarinstansi kerja eselon II di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG DKP.

DKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta penguatan dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah Pelayanan Perizinan, Pengawasan kepada pelaku usaha/bisnis ternak dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengujian produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha gasein rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Tematik



Pengawasan Tematik dilakukan dalam rangka melihat program kegiatan dan sub kegiatan mana saja yang mendukung sasaran RPD. Dari 19 sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung 4 sasaran antara lain:

1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
3. Meningkatkan kuantitas infrastruktur;
4. Meningkatkan Tingkat Kemiskinan;

4. Inovasi

Pengarusutamaan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Inovasi yang dilakukan merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing daerah dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Strategi pengarusutamaan inovasi terdiri dari aspek pematapan ekosistem (supply), pemenuhan (demand), dan pengelolaan big data. Penyediaan layanan digital terintegrasi lingkup DKP yang mencakup penyediaan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penertapan SPBE DKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (online), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.



BAB VI

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 6 program untuk kurun waktu 2023-2026, dengan penjelasan 1 program bersifat rutin dan 5 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026.

Tabel ini menggambarkan juga besaran indikator untuk tiap-tiap program yang dihasilkan, bahkan sampai dengan level kegiatan beserta juga data indikator yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan tersebut. Seluruh program dan kegiatan ini ditetapkan sebagai upaya nyata mewujudkan pelaksanaan program di Bidang Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan 2023-2026 mendatang.

Pada penyusunan Rencana 2023-2026 penggunaan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang telah diperbaharui dengan Kepermdagri 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemertaklakan Klasifikasi, Kodeifikasi Dan Nomenklatur Pemertaklakan Perbantuan Dan Keuangan Daerah. Pada Kepermdagri 050-5889/2021 telah disusun sampai indikator Sub kegiatan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan menyatukan penempatan atas indikator sub kegiatan yang ada.

Pada Rencana 2023-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan menampung 6 Program yakni:

1. Program Pengelolaan Kelautan, Perairan Dan Pulau-Pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



6. Program Pemanjang Utusan Pemerintahan Daerah provinsi sebagai program rutin operasional dinas.

Secara lebih detail akan ditampilkan dalam tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
 Dinas Kesehatan Dan Keluarga Pro: Kap. Sekel
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No	Nama Program	Kategori Program	Sub Program	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Program												Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		2023-2026		Kategori Kegiatan			
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi				
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1			





No.	Nama	Jenis	Kategori	Keterangan	Status	Data Pelaksanaan dan Realisasi												Catatan						
						2018		2019		2020		2021		2022		2023								
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okta	Nov	Dik							





No	Kategori	Sub-Kategori	Detail	Kategori	Sub-Kategori	Kategori										Detail	Kategori				
						Sub-Kategori	Detail	Sub-Kategori	Detail	Sub-Kategori	Detail	Sub-Kategori	Detail	Sub-Kategori	Detail			Sub-Kategori	Detail		





No.	Nama	Jenis	Kategori	Kategori	Membuat	Membuat		Kategori								Total									
												





No.	Nama	Jenis	Lokasi	Kategori	Klasifikasi	Tipe dan Sub-Tipe Bencana										Catatan			
						Gempa Bumi		Banjir		Kebakaran		Badai		Lain-lain					
						Frekuensi	Intensitas	Luasan	Waktu	Luasan	Waktu	Luasan	Waktu	Luasan	Waktu				





No	Jenis Bencana	Kategori	Mekanismenya	Klasifikasi	Kategori	Tingkat Bahaya				Kategori	Klasifikasi	Kategori	Klasifikasi	
						1	2	3	4					



No.	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)												Kategori	No.
					Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori			
					Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target		



No.	Nama	Jenis	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori												Kategori	Kategori
						Kategori													
						Kategori													





No.	Lokasi	Kategori	Jumlah	Keterangan	Rincian Perencanaan Anggaran														
					Bidang	Sub-Bidang	Uraian	Volume	Unit Harga	Nilai Anggaran	Bidang	Sub-Bidang	Uraian	Volume	Unit Harga	Nilai Anggaran	Jumlah		





No.	Kategori	Sub-kategori	Kecenderungan	Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori)																Tahun		
					Kategori A		Kategori B		Kategori C		Kategori D		Kategori E		Kategori F		Kategori G		Kategori H				
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			





No	Uraian	Kategori	Klasifikasi	Kategori	Kategori		Kategori		Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
					Kategori	Kategori	Kategori	Kategori									
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	



No.	Uraian	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Kategori																Total	
					Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori					





No	Nama	Jenis Bencana	Sifat Bencana	Lokasi	Kategori	Tingkat	Bencana Akibat Alam				Bencana Akibat Manusia				Bencana Akibat Kombinasi Alam dan Manusia				Tipe		
							Tsunami	Gempa Bumi	Siklon Tropis	Badai	Kebakaran	Korupsi	Perampokan	Kecelakaan	Teror	Siber	Wabah	Perubahan Iklim		Hama	Pestisida





No	Kategori	Nama Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan												Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
						Kategori Kegiatan													
						Kategori Kegiatan													





No	Uraian	Kategori	Klasifikasi	Matriks Risiko	Kategori Risiko	Rencana Tindakan Pengendalian										Kategori Risiko	Matriks Risiko		
						Strategis		Operasional		Strategis		Operasional		Strategis				Operasional	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12





No	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Sub Kategori	Rencana Strategis (RENSTRA)												No						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							





No	Kategori	Nama	Kategori	Lokasi	Jenis Bencana	Rincian Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan								
						Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V		Tahap VI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	





No	Kategori	Sub-kategori	Kode	Uraian	Kategori dan Sub-kategori													
					Kategori				Sub-kategori				Sub-kategori					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		





No	Uraian	Rencana Kerja	Rencana Anggaran	Rincian Rencana Anggaran												Total				
				Kategori				Kategori				Kategori								
				A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D					
1																				





No	Kategori	Nama	Detail	Tipe	Perkiraan Biaya (Rp)		Perkiraan Waktu Pelaksanaan (Bulan)								Total			
					Estimasi	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	





No.	Lokasi	Nama Lokasi	Kategori	Jenis Risiko	Potensi Dampak	Indikator Risiko Bencana																Tingkat Risiko
						Risiko Kebakaran		Risiko Banjir		Risiko Gempa		Risiko Tsunami		Risiko Badai		Risiko Tanah Longsor		Risiko Lainnya				
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			





No.	Uraian	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Detail Kegiatan/Program													Kategori	Sub Kategori
					Kategori	Sub Kategori	Kategori		Sub Kategori		Kategori		Sub Kategori		Kategori	Sub Kategori			
							Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori					



No.	Nama	Jenis	Lokasi	Kategori	Klasifikasi	Kondisi												Tingkat	Kategori
						Kondisi		Kondisi		Kondisi		Kondisi		Kondisi		Kondisi			
						Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi	Kondisi			





No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Kategori Kegiatan				Kategori Kegiatan Lainnya							
					Keagamaan	Sosial	Kemasyarakatan	Kultur	Keperawatan	Kesehatan	Keperawatan	Kesehatan	Kemasyarakatan	Kultur		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																





No.	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas												Kategori	Sub-kategori		
						Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori			Kategori	Sub-kategori





No.	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Tipe	Indikator Kinerja Utama (IKU)								Rata-rata	Bobot
						Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)			
						1	2	3	4	5	6	7	8		





No	Jenis Bencana	Arahancak	Dampak	Kategori	Rencana Aksi Program (RAP) - 2023-2028												No					
					2023		2024		2025		2026		2027		2028							
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						





No	Nama	Jenis	Kategori	Lokasi	Klasifikasi	Klasifikasi Risiko Bencana												Kategori		
						Gempa Bumi				Banjir				Siklon Tropis					Kategori	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			





No.	Nama	Jenis	Lokasi	Kategori	Klasifikasi	Kategori Risiko Bencana														Tingkat			
						Gempa Bumi				Banjir				Siklon Tropis				Tsunami					
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				





No	Nama	Jenis	Kategori	Kategori	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)												Total	
					RPP		RPP		RPP		RPP		RPP		RPP			
					Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		





No.	Uraian	Kategori	Uraian	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja Utama								Kategori	Kategori
						Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian		
1	1.1.1.1.1.1.1														
2	1.1.1.1.1.1.2														
3	1.1.1.1.1.1.3														
4	1.1.1.1.1.1.4														
5	1.1.1.1.1.1.5														
6	1.1.1.1.1.1.6														
7	1.1.1.1.1.1.7														
8	1.1.1.1.1.1.8														
9	1.1.1.1.1.1.9														
10	1.1.1.1.1.1.10														
11	1.1.1.1.1.1.11														
12	1.1.1.1.1.1.12														
13	1.1.1.1.1.1.13														
14	1.1.1.1.1.1.14														
15	1.1.1.1.1.1.15														
16	1.1.1.1.1.1.16														
17	1.1.1.1.1.1.17														
18	1.1.1.1.1.1.18														
19	1.1.1.1.1.1.19														
20	1.1.1.1.1.1.20														





No.	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Tipe Bencana													
					Tipe Bencana						Tipe Bencana							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		





No.	Kategori	Sub-kategori	Kendali Risiko	Indikator	Tipe Risiko (Berdasarkan Lokasi)																																					
					Lokasi Strategis			Lokasi Penting				Lokasi Biasa				Total																										
					A	B	C	A	B	C	A	B	C																													



No.	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)								Kategori	Uraian
					Rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI)		Rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB)		Rendahnya Angka Kematian Neonatal (AKN)		Rendahnya Angka Kematian Perinatal (AKP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



No	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Nama Risiko	Indikator Risiko	Tingkat Risiko	Indikator Kinerja Utama (IKU)												Tingkat Risiko		
						IKU 1	IKU 2	IKU 3	IKU 4	IKU 5	IKU 6	IKU 7	IKU 8	IKU 9	IKU 10	IKU 11	IKU 12			
1																				





No.	Nama	Jenis	Kategori	Materi Pokok Bahasan	Alokasi Waktu	Materi Pokok Bahasan												Kategori	No.	
						Materi Pokok Bahasan				Materi Pokok Bahasan				Materi Pokok Bahasan						Materi Pokok Bahasan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			





No.	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Alokasi Anggaran		Kategori Lainnya								Sub Total	Total
					Rencana	Realisasi	1	2	3	4	5	6	7	8		



No.	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Kategori		Kategori								Kategori	Kategori			
					Kategori	Kategori	Kategori				Kategori						Kategori	Kategori	
							1	2	3	4	5	6	7	8					9





No	Kategori	Sub Kategori	Nama	Jumlah	Pembagian Dana Berdasarkan Struktur												Keterangan
					Bidang						Lembaga						
					Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	Struktur	





No.	Kategori	Sub Kategori	Nama	Kategori	Rencana Strategis (RENSTRA)										No.					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				





No.	Kategori	Sub-Kategori	Nama	Kategori	Struktur Organisasi												Kategori				
					Kategori	Sub-Kategori	Kategori				Sub-Kategori				Kategori	Sub-Kategori					
							Kategori	Sub-Kategori	Kategori	Sub-Kategori	Kategori	Sub-Kategori	Kategori	Sub-Kategori							





No	Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe Kegiatan	Tipe Kegiatan (Kategori Kegiatan)										Tipe Kegiatan	Tipe Kegiatan	Tipe Kegiatan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						



No	Nama	Jenis	Lokasi	Kategori	Penerapan	Keterangan	Kategori Risiko				Kategori Strategi				Tipe	
							Risiko	Sifat	Waktu	Skala	Strategi	Waktu	Skala	Strategi		





No	Jenis Bencana	Risiko Bencana	Dampak Bencana	Strategi Mitigasi	Tingkat Risiko	Kategori Risiko								Tingkat Risiko	
						1	2	3	4	5	6	7	8		





No	Nama	Jenis	Lokasi	Kategori	Klasifikasi	Rencana Aksi/Program/Strategis/Operasional																Tgl. Selesai	
						Tahap 1						Tahap 2				Tahap 3				Tahap 4			
						No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian		





BAB VII

Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Disas Kelatan dan Parikaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Target Kinerja (2023-2027)				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		100%	100%	100%	100%	100%
1	1.1. Jumlah area Perumahan Layak (Perumahan) yang Terselesa di Wilayah masing-masing Daerah (2023)		0	0	0	0	0
2	2. Meningkatkan Kualitas Kehutanan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Berkeadilan (2023)		2000	2000	2000	2000	2000
3	3. Meningkatkan Kualitas Kehutanan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Berkeadilan (2023)		2000	2000	2000	2000	2000
4	4. Meningkatkan Kualitas Kehutanan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Berkeadilan (2023)			1,0			
5	5. Meningkatkan Kualitas Kehutanan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Berkeadilan (2023)			1,0			1,0



No.	Kategori	Kategori Kendaraan Kendaraan	Tipe Kendaraan Baru					Kendaraan Kendaraan Kendaraan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mengembangkan Sistem Kendaraan Baru (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) yang Dapat Diperbaiki (Kendaraan Baru) dengan Angka 100%	-	2000	2000	2000	2000	2000	
2	Mengembangkan Sistem Kendaraan Baru (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) yang Dapat Diperbaiki (Kendaraan Baru) dengan Angka 100% yang tersebar di Luar Negeri, Negara Utama, Eropa, dan Amerika Latin yang dapat diperbaiki Lain. Ketersediaan di (Kendaraan Baru)	-	2000	2000	2000	2000	2000	
3	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	100	100	100	100	100	100	
4	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	-	100	100	100	100	
5	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	100	100	100	100	100	100	
6	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
7	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100000	100000	100000	100000	100000	
8	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
9	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
10	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100000	100000	100000	100000	100000	
11	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
12	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
13	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
14	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
15	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
16	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
17	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
18	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
19	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	
20	Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru) Perawatan (Kendaraan Baru)	-	100	100	100	100	100	



No.	Kategori	Kendaraan Kategori Kendaraan	Kendaraan Baru					Kendaraan Kategori Kendaraan
			2019	2020	2021	2022	2023	
-	Untuk Prakeris (sisa Persewaan di Wilayah Operasi, Operasi, Mekanik, dan Transportasi, dan Layanan yang Dapat Dihasilkan dari Ketersediaan Kebutuhan Kebutuhan / Kebutuhan) dan Persewaan yang lainnya	-	900	100	900	900	900	
-	Untuk kendaraan operasional field perkebunan	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
-	Untuk Lada, Persewaan dan Pengiriman Hasil Persewaan (sisa Persewaan Kebutuhan Kebutuhan / Kebutuhan) dan Persewaan (Informasional)	-	60	60	60	60	60	
-	Untuk alat mesin diada, kendaraan baru yang dibutuhkan untuk dan kebutuhan field perkebunan	-	200	200	200	200	200	
-	Untuk kendaraan operasional dan persewaan yang lainnya	-	20	20	20	20	20	
-	Untuk kendaraan operasional persediaan (sisa perkebunan)	-	100	100	100	100	100	
-	Persewaan TPK yang tidak beroperasi (sisa dan kebutuhan persediaan)	-	100	100	100	100	100	
-	Persewaan mesin pengisian dan persewaan field perkebunan yang beroperasi (sisa dan kebutuhan field perkebunan)	-	600	600	600	600	600	
-	Untuk pengalihan dan pengalihan persediaan dan persediaan kebutuhan untuk dan kebutuhan field perkebunan (sisa dan kebutuhan persediaan dan kebutuhan)	-	600	600	600	600	600	
-	Persewaan field Kebutuhan (sisa Persewaan)	-	100	100	100	100	100	
-	Untuk Prakeris (sisa Persewaan di Wilayah Operasi, Operasi, Mekanik, dan Transportasi, dan Layanan yang Dapat Dihasilkan dari Ketersediaan Kebutuhan Kebutuhan / Kebutuhan) dan Persewaan yang lainnya	-	100	100	100	100	100	
-	Untuk dan Kebutuhan yang dibutuhkan untuk persediaan persediaan dan persediaan Kebutuhan	-	200	200	200	200	200	
-	Untuk kendaraan yang dibutuhkan	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
-	Untuk kendaraan operasional dan persewaan yang lainnya yang dibutuhkan	-	200	200	200	200	200	
-	Untuk kendaraan yang dibutuhkan	-	50	50	50	50	50	
-	Persewaan field Kebutuhan (sisa Persewaan)	-	100	100	100	100	100	
-	Untuk Prakeris (sisa Persewaan dan Persewaan (sisa Persewaan / Kebutuhan / Kebutuhan) dan Persewaan (Informasional)	-	100	100	100	100	100	
-	Untuk Prakeris (sisa Persewaan dan Persewaan (sisa Persewaan / Kebutuhan / Kebutuhan) dan Persewaan (Informasional)	-	20	20	20	20	20	



No.	Kategori	Kategori Kendaraan (Kendaraan)	Tipe Kendaraan (Kendaraan)					Kendaraan Kendaraan (Kendaraan)
			1	2	3	4	5	
1	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
29	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
31	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
32	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
33	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
34	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
35	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
36	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
37	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
38	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
39	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
40	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
41	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
43	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
44	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
45	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
46	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
47	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
48	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
49	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	
50	Subsidi	Subsidi	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Kategori	Tahun Anggaran 2021	Tipe Kegiatan/Program				Total Anggaran 2021 (Rp)
			Program	Sub-Program	Sub-Kategori	Kategori	
1	Salah Persewaan dan Penyewaan Tanah Persewaan (Gedung, 2.370.000 Meter Persegi/are)	-	-	000	000	000	000
2	Salah Sewa/ Sewa Tanah (Tanah Persewaan, Gedung, Toko, Apartemen, 2.370.000 Meter Persegi/are)	-	-	000	000	000	000



BAB VIII

Penutup

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 -2026 mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama empat tahun RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Strategis 2021 - 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tingkat menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam empat tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 6 Program dengan 13 Indikator Kinerja Program (*outcome*) dengan total pagu anggaran Rp.214.301.936.000,00.

Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan dikoreksi berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dr. Drs. Agus Satriadi, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 197308091993031002

LAMPIRAN

BA

**Verifikasi
Renstra
Perangkat
Daerah**

Kalkulation der Kosten für die Produktion eines Produktes												
Nr.	Vorgang / Material	Menge	2018			2019			2020			
			Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	
1	Materialkosten	10000	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	
2	Arbeitslohn	20000	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	
3	Werkstoffe	5000	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	
4	Werkzeuge	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
5	Werkstatt	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
6	Werkzeugverschleiß	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
7	Werkzeugneubau	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
8	Werkzeugreparatur	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
9	Werkzeugersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
10	Werkzeugwartung	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
11	Werkzeugüberholung	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
12	Werkzeugersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
13	Werkzeugverschleißersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
14	Werkzeugreparaturersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
15	Werkzeugneubauersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
16	Werkzeugreparaturersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
17	Werkzeugüberholungersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
18	Werkzeugersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
19	Werkzeugverschleißersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
20	Werkzeugreparaturersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
21	Werkzeugneubauersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
22	Werkzeugreparaturersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
23	Werkzeugüberholungersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
24	Werkzeugersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
25	Werkzeugverschleißersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
26	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
27	Werkzeugneubauersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
28	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
29	Werkzeugüberholungersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
30	Werkzeugersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
31	Werkzeugverschleißersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
32	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
33	Werkzeugneubauersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
34	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
35	Werkzeugüberholungersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
36	Werkzeugersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
37	Werkzeugverschleißersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
38	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
39	Werkzeugneubauersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
40	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
41	Werkzeugüberholungersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
42	Werkzeugersatzteileersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
43	Werkzeugverschleißersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
44	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
45	Werkzeugneubauersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
46	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
47	Werkzeugüberholungersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
48	Werkzeugersatzteileersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
49	Werkzeugverschleißersatzteileersatzteileersatzteileersatz	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	
50	Werkzeugreparaturersatzteileersatzteileersatzteileersatzteileersatzteile	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	

<p>1. Investment in Property, Plant, and Equipment</p> <p>2. Investment in Intangible Assets</p> <p>3. Acquisition of Other Companies</p> <p>4. Other Non-current Assets</p>	<p>1. Property, Plant, and Equipment</p> <p>2. Intangible Assets</p> <p>3. Goodwill</p> <p>4. Other Non-current Assets</p>										
<p>5. Investment in Financial Assets</p>	<p>1. Financial Assets</p>	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<p>6. Investment in Financial Assets</p>	<p>1. Financial Assets</p>	100	100,000.00	100	100,000.00	100	100,000.00	100	100,000.00	100	100,000.00
<p>7. Investment in Financial Assets</p>	<p>1. Financial Assets</p>	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00
<p>8. Investment in Financial Assets</p>	<p>1. Financial Assets</p>										

	Kategori	Sub-kategori	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100,000	100,000,000	100,000	100,000,000	100,000	100,000,000	100,000	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Pengeluaran Modal	Pengeluaran Modal	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

Gruppen- und Einzel- Töne Aufwendungen an sonstige Mitglieder	Einzel- Töne und Gruppen- Töne Einzel- Aufwendungen von 0 bis 1000000	0	11.000,00	0	11.000,00	0	-11.000,00	0	11.000,00
Aufnahme von Darlehenen (ausgewählte Beiträge enthalten)	Einzel- Darlehen Gruppen- Darlehen Einzel- Darlehen Gruppen- Darlehen Einzel- Darlehen	0	100.000,00	0	100.000,00	0	-100.000,00	0	100.000,00
		0	11.000,00	0	11.000,00	0	-11.000,00	0	11.000,00
Gruppen- und Einzel- Töne an sonstige	Einzel- Töne Gruppen- Töne Einzel- Töne Gruppen- Töne	0	11.000,00	0	11.000,00	0	-11.000,00	0	11.000,00
Aufnahme von Darlehenen (ausgewählte Beiträge enthalten) von anderen Mitgliedern	Einzel- Darlehen Gruppen- Darlehen Einzel- Darlehen Gruppen- Darlehen	0	100.000,00	0	100.000,00	0	-100.000,00	0	100.000,00
		0		0		0		0	

Programme des dépenses de l'État pour l'exercice 2010 (en millions d'euros) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010)	(en millions d'euros) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010)	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
Programme des dépenses de l'État pour l'exercice 2010 (en millions d'euros) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010)	(en millions d'euros) (à l'exception des dépenses de l'État pour l'exercice 2010)	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000

(en millions d'euros)

Programme des dépenses de l'État pour l'exercice 2010												
No	Description	Unité	2010		2011		2012		2013		2014	
			Total	En	Total	En	Total	En	Total	En		
1	Programme des dépenses de l'État pour l'exercice 2010	(en millions d'euros)	100 000	100 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000 000

<p> 1. Keuntungan Bersih (Net Profit) </p>	<p> 1. Keuntungan Bersih (Net Profit) </p>	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<p> 2. Keuntungan Sebelum Pajak (Earnings Before Tax) </p>	<p> 2. Keuntungan Sebelum Pajak (Earnings Before Tax) </p>	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<p> 3. Keuntungan Setelah Pajak (Earnings After Tax) </p>	<p> 3. Keuntungan Setelah Pajak (Earnings After Tax) </p>	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<p> 4. Keuntungan Sebelum Pajak (Earnings Before Tax) </p>	<p> 4. Keuntungan Sebelum Pajak (Earnings Before Tax) </p>	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<p> 5. Keuntungan Setelah Pajak (Earnings After Tax) </p>	<p> 5. Keuntungan Setelah Pajak (Earnings After Tax) </p>	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

<p>Beispiel: Steuerwert im Jahr 2019: 1000000 2020: 1000000 2021: 1000000</p>	<p>1000000 1000000 1000000</p>	100	1000000	100	1000000	100	1000000	100	1000000
<p>Beispiel: Steuerwert im Jahr 2019: 1000000 2020: 1000000 2021: 1000000</p>	<p>1000000 1000000 1000000</p>	100	1000000	100	1000000	100	1000000	100	1000000
<p>Beispiel: Steuerwert im Jahr 2019: 1000000 2020: 1000000 2021: 1000000</p>	<p>1000000 1000000 1000000</p>	100	1000000	100	1000000	100	1000000	100	1000000
<p>Beispiel: Steuerwert im Jahr 2019: 1000000 2020: 1000000 2021: 1000000</p>	<p>1000000 1000000 1000000</p>	100	1000000	100	1000000	100	1000000	100	1000000
<p>Beispiel: Steuerwert im Jahr 2019: 1000000 2020: 1000000 2021: 1000000</p>	<p>1000000 1000000 1000000</p>	100	1000000	100	1000000	100	1000000	100	1000000

<p>1. Identify the problem - What is the problem? - Why is it a problem? - How is it being solved? - What are the goals? - What are the constraints? - What are the resources?</p>	<p>1. Identify the problem - What is the problem? - Why is it a problem? - How is it being solved? - What are the goals? - What are the constraints? - What are the resources?</p>										
<p>2. Develop a solution - What are the possible solutions? - Which solution is the best? - Why is it the best? - How is it being implemented?</p>	<p>2. Develop a solution - What are the possible solutions? - Which solution is the best? - Why is it the best? - How is it being implemented?</p>										
<p>3. Evaluate the solution - How well is the solution working? - What are the results? - What are the challenges? - What are the lessons learned?</p>	<p>3. Evaluate the solution - How well is the solution working? - What are the results? - What are the challenges? - What are the lessons learned?</p>	10	1000000	20	1000000	10	1000000	10	1000000	10	1000000
<p>4. Implement the solution - How is the solution being implemented? - What are the challenges? - What are the lessons learned?</p>	<p>4. Implement the solution - How is the solution being implemented? - What are the challenges? - What are the lessons learned?</p>		1000000								

Maßnahme (nach Priorität) zur Erreichung der Ziele	Träger/Ansprech- person	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte								
Ergebnis-berichterstattung	Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterte Ergebnis-berichterstattung Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterte Ergebnis-berichterstattung Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterte Ergebnis-berichterstattung Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterte Ergebnis-berichterstattung Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterte Ergebnis-berichterstattung Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte Ergebnis-berichte	Erweiterte Ergebnis- berichterstattung Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte Ergebnis- berichte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

<p>Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010</p>	<p>Umsatz Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>
<p>Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010</p>	<p>Umsatz Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>
<p>Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010</p>	<p>Umsatz Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>
<p>Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010</p>	<p>Umsatz Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>
<p>Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010</p>	<p>Umsatz Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge Beiträge</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0</p>	<p>1.000.000,00</p>

<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 1) </p>	<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 1) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 1) </p>	<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 1) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 2) </p>	<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 2) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 2) </p>	<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 2) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 3) </p>	<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 3) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 3) </p>	<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 3) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 4) </p>	<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 4) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 4) </p>	<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 4) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 5) </p>	<p> Geplante Ausgaben Sachverhalte (Kapitel 5) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 5) </p>	<p> Geplante Einnahmen Sachverhalte (Kapitel 5) </p>	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00

<p>Verfahren Kosten Internal Data Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>
<p>Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>
<p>Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100) Verfahren der Programm (100)</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>	<p>0</p>	<p>100.000,00</p>

<p>Bay Bridge and Golden Gate Ferry System Bay Area Ferry System Bay Area Ferry System Bay Area Ferry System</p>	<ul style="list-style-type: none"> General Construction Operating Capital Other 	0	100,000,000	1	100,000,000	2	200,000,000	3	200,000,000
	<ul style="list-style-type: none"> Operating Capital Other 	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000
<p>San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System</p>	<ul style="list-style-type: none"> Operating Capital Other 	80%	80,000,000	80%	80,000,000	80%	160,000,000	80%	160,000,000
<p>San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System San Francisco Ferry System</p>	<ul style="list-style-type: none"> Operating Capital Other 	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000

Proyek tambahan di luar pekerjaan perencanaan awal	Uraian Meningkatkan kemampuan Kendaraan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	-	80.000,00	-	20.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
Penambahan tenaga kerja untuk pekerjaan di luar pekerjaan awal	Meningkatkan Kemampuan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	1	70.000,00	2	70.000,00	3	70.000,00	4	70.000,00
penambahan peralatan di luar pekerjaan perencanaan awal untuk pekerjaan di luar pekerjaan awal	Meningkatkan Kemampuan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	1	10.000,00	2	10.000,00	3	10.000,00	4	10.000,00
penambahan biaya perantara untuk pekerjaan di luar pekerjaan awal	Meningkatkan Kemampuan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	1	100.000,00	2	100.000,00	3	100.000,00	4	100.000,00
Penambahan biaya perantara untuk pekerjaan di luar pekerjaan awal	Meningkatkan Kemampuan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	1	70.000,00	2	70.000,00	3	70.000,00	4	70.000,00
penambahan biaya perantara untuk pekerjaan di luar pekerjaan awal	Meningkatkan Kemampuan Kendaraan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Kemampuan	1	100.000,00	2	100.000,00	3	100.000,00	4	100.000,00

	peralatan pengangkutan kendaraan dari perusahaan lain yang diperoleh dari perusahaan perusahaan lain	peralatan pengangkutan kendaraan dari perusahaan perusahaan lain	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	10,00	1.000.000,00	10,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	10,00	1.000.000,00	10,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	peralatan komunikasi telepon	peralatan komunikasi telepon	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00

Ergebnis Wirtschaftsprüfung Typ 01	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis Wirtschaftsprüfung der Ergebnis Wirtschaftsprüfung 010	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis der Wirtschaftsprüfung 010	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis der Wirtschaftsprüfung Ergebnis Wirtschaftsprüfung	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis der Wirtschaftsprüfung Ergebnis Wirtschaftsprüfung	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis der Wirtschaftsprüfung Ergebnis Wirtschaftsprüfung	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00
Ergebnis der Wirtschaftsprüfung Ergebnis Wirtschaftsprüfung	100	10.000,00	80	8.000,00	60	6.000,00	40	4.000,00

Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00
Ergebnisbeitrag der letzten Tage des Monats August	Umsatz Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	0	+10.000,00	0	+10.000,00	0	-10.000,00	0	+10.000,00

Kategori (Kode)	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sesuai dengan rencana	Kategori (Kode)	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Item	Unit	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Investment (Initial) - 20000000	Initial Investment	0	20000000	0	20000000	0	20000000
Revenue (1000000000)	Revenue	0	1000000000	0	1000000000	0	1000000000
Operating Expenses (700000000)	Operating Expenses	0	700000000	0	700000000	0	700000000
Depreciation Expense (200000000)	Depreciation Expense	0	200000000	0	200000000	0	200000000
Interest Expense (100000000)	Interest Expense	0	100000000	0	100000000	0	100000000
Income Tax Expense (100000000)	Income Tax Expense	0	100000000	0	100000000	0	100000000
Net Income (100000000)	Net Income	0	100000000	0	100000000	0	100000000
Dividend Payout (50000000)	Dividend Payout	0	50000000	0	50000000	0	50000000
Retained Earnings (50000000)	Retained Earnings	0	50000000	0	50000000	0	50000000

Budgetary Control System and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000	0	2,000,000	0	3,000,000	0	2,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
Budgetary Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
Budgetary Control and Expenses Control and Expenses	Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses Control and Expenses	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000

Beschreibung der Maßnahme (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)	Maßnahmenkategorie (Maßnahmenkategorie)
Beschaffung von Dienstleistungen für die...	Dienstleistungen	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
Beschaffung von Dienstleistungen für die...	Dienstleistungen	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000
Beschaffung von Dienstleistungen für die...	Dienstleistungen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Beschaffung von Dienstleistungen für die...	Dienstleistungen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Beschaffung von Dienstleistungen für die...	Dienstleistungen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000

Investment (Initial) - Area for Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
	Area for Investment Area (over 2000000000)	8000	10000000	8000	20000000	8000	10000000	8000	20000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000
Investment (Initial) - Area (over 2000000000)	Initial Area for Investment Area (over 2000000000)	0	1000000	0	2000000	0	1000000	0	2000000

Beitrag zur Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
Beitrag zur Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung	Umsatz Erlös Kapitalerhöhung	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000

Ergebnis Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				2	20.000,00	2	20.000,00	2	20.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				4	40.000,00	4	40.000,00	4	40.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				5	50.000,00	5	50.000,00	5	50.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				7	70.000,00	7	70.000,00	7	70.000,00
Ergebn Gewinn der Investition	Ergebn der Investition der Investition der Investition				8	80.000,00	8	80.000,00	8	80.000,00

Subtotal Anggaran Dana dan Transfer Tunjangan Tetap yang dianggarkan	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
Anggaran Pendapatan dan Transfer	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan	20.000	200.000.000	20.700	2.000.000.000	21.400	2.020.000.000	24.000	2.040.000.000
Anggaran Pendapatan dan Transfer yang akan dipergunakan	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan	190	1.800.000.000	206	1.980.000.000	190	1.980.000.000	190	1.980.000.000
Subtotal Anggaran Dana dan Transfer yang akan dipergunakan	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan	190	1.800.000.000	206	1.980.000.000	190	1.980.000.000	190	1.980.000.000
Anggaran Transfer yang akan dipergunakan	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000
Anggaran Pendapatan dan Transfer yang akan dipergunakan	Unit Kerja dan Transfer Anggaran yang akan dipergunakan	190	1.800.000.000	206	1.980.000.000	190	1.980.000.000	190	1.980.000.000

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)	Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)	200	20,000,000	200	10,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000
Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)	Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)				10,000,000				
Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)	Services provided to the Government of Ontario (including the Ontario Health Services Corporation and the Ontario Health Insurance Board)	-	-	-	10,000,000				

<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>20</p>	<p>40.000.000</p>	<p>20</p>	<p>40.000.000</p>	<p>20</p>	<p>-40.000.000</p>	<p>20</p>	<p>40.000.000</p>
<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>4</p>	<p>80.000.000</p>	<p>4</p>	<p>80.000.000</p>	<p>4</p>	<p>-80.000.000</p>	<p>4</p>	<p>80.000.000</p>
<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>77.000</p>	<p>180.000.000</p>	<p>77.000</p>	<p>180.000.000</p>	<p>77.000</p>	<p>-180.000.000</p>	<p>77.000</p>	<p>180.000.000</p>
<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>-100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>
<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>Rekening Rekening lain-lain Rekening Rekening lain-lain</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>-100.000.000</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>

<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>1</p>	<p>48.000,00</p>	<p>1</p>	<p>48.000,00</p>	<p>1</p>	<p>48.000,00</p>	<p>1</p>	<p>48.000,00</p>
<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>2</p>	<p>176.000,00</p>	<p>20</p>	<p>176.000,00</p>	<p>20</p>	<p>176.000,00</p>	<p>20</p>	<p>176.000,00</p>
<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>3</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>
<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>4</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>
<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>5</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>	<p>20</p>	<p>22.000,00</p>
<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sachverständiger (Sachverständigenbüro) im Bereich der Bautechnik</p>	<p>6</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>	<p>20</p>	<p>76.000,00</p>

Pengeluaran untuk pembelian mesin dan perlengkapan kantor	Mesin Kasir Komputer Meja Kantor Kursi Kantor Perlengkapan Kantor	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
Pengeluaran untuk pembelian perlengkapan kantor (meja, kursi, komputer, printer, dll)	Meja Kantor Kursi Kantor Komputer Printer Perlengkapan Kantor	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00

2. The following information is available:

No.	Account Name	Account	2019		2020		2021		2022	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1.	Saldo Awal 2019			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
	Saldo Akhir 2019		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Saldo Awal 2020			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
	Saldo Akhir 2020		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Saldo Awal 2021			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
	Saldo Akhir 2021		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Saldo Awal 2022			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
	Saldo Akhir 2022		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	0	800.000,00	1	200.000,00	2	200.000,00	3	200.000,00
	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>		200.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00
	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>		200.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00
2	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>		200.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00
	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00
	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>	<p>Verfahrenskosten Internal Audit Bewertung der Programme (Teil der Kostenverteilung) (Mehrwertsteuer 4 % (Nett)) Netto-Trennung</p>		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00

7	<p>Investment in fixed assets (Net of accumulated depreciation)</p>	<p>Net of accumulated depreciation</p>	12	20000000	0	20000000	0	20000000	0	20000000
	<p>Investment in fixed assets (Net of accumulated depreciation)</p>	<p>Net of accumulated depreciation</p>	12	20000000	0	20000000	0	20000000	0	20000000
	<p>Investment in fixed assets (Net of accumulated depreciation)</p>	<p>Net of accumulated depreciation</p>	12	20000000	0	20000000	0	20000000	0	20000000